**ABSTRAK**

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia, manajemen keuangan daerah dianggap sangat penting karena merupakan salah satu sumber penting dalam mencapai good governance, maka dari itu kualitas atas laporan keuangan harus terus ditingkatkan dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam mengelola kekayaan daerahnya dalam hal ini berupa barang milik daerah atau aset daerah Salah Satu daerah yang mengelola aset daerah adalah Kabupaten Muna, dimana pengelolaan aset tetap salah satu tahapannya yaitu penatausahaan aset tetap yang merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penatausahaan Aset Daerah Kabupaten Muna yang dikelola oleh BKAD Kabupaten Muna, kendala apa yang dihadapi, serta upaya apa yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Muna dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan tekhnik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset daerah Kabupaten Muna sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun masih memiliki beberapa kendala dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan analisis hasil penelitian penulis dapat memberikan saran agar sebaiknya BKAD Kabupaten Muna tetap konsisten akan kesesuaian terhadap peratura yang ada pada pelaksanaan penatausahaan agar upaya yang telah dilakukan dapat mencapai hasil yang diinginkan.

**ABSTRACT**

The implementation of fiscal decentralization and regional autonomy in Indonesia, the financial management area is considered very important because it is one of the sources is important in achieving good governance, thus the quality of the financial statements must be kept enhanced accountability in local government. The local Government has an obligation to manage the wealth of his country in this case in the form of goods belonging to the county or regional assets one of the areas that manages the assets of the area, whereby Muna Regency is the management of fixed assets of one of the stages the i.e. administering fixed assets which is the important thing to be done by the Agency and the Financial Assets of the region.

This research aims to find out how the administering Regional Muna Regency Asset managed by BKAD Muna Regency, what constraints faced, as well as the efforts of what was done by BKAD Muna Regency in overcoming the barriers. This research uses descriptive research with the nature of the inductive approach. In collecting the data, the authors use a dwarf in the interview, observation, and documentation. While the data analysis technique used is the reduction of the data, the presentation of data, and the verification conclusion and withdrawal. The selected location to carry out the research and Asset Finance is the area (BKAD) Muna Regency Southeast Sulawesi province.

The results showed that the administering regional assets District Muna is in compliance with regulation of the Minister of Home Affairs number 19 Year 2016 Technical Guidelines regarding management of Goods belonging to the area, yet still have some constraints in the its commissioning. Based on the analysis of the results of the research the author can give advice so that the BKAD Muna Regency should consistently be compliance against existing peratura on the implementation of the administering so that the effort that has been done can achieve results desired.